

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
CENTER FOR INDONESIA'S STRATEGIC DEVELOPMENT INITIATIVES
(CISDI)**

**GAMBARAN PROSES *POLITICAL MAPPING* KEBIJAKAN KENAIKAN
CUKAI ROKOK SEBAGAI UPAYA *TOBACCO CONTROL* DI *CENTER FOR
INDONESIA'S STRATEGIC DEVELOPMENT INITIATIVES (CISDI)***



Oleh:

RANDA ARNIKA MURTININGTYAS

NIM. 101711133172

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG DI CENTER FOR INDONESIA'S STRATEGIC
DEVELOPMENT INITIATIVES (CISDI)**

Disusun Oleh:

RANDA ARNIKA MURTININGTYAS

NIM. 101711133172

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen,

Tanggal Maret 2021



Ilham Akhsanu Ridlo, S.KM., M.Kes

NIP. 198603232015041003

Pembimbing di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI),

Tanggal Maret 2021



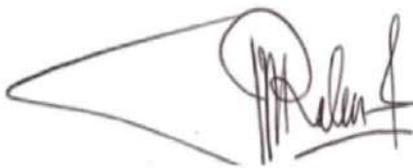
Lara Rizka

NIP. -

Mengetahui

Ketua Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,

Tanggal Maret 2021



Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes

NIP. 197510181999032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul “GAMBARAN PROSES POLITICAL MAPPING UNTUK TOBACCO CONTROL DI CENTER FOR INDONESIA’S STRATEGIC DEVELOPMENT INITIATIVES (CISDI)”, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada yang terhormat:

1. Dr. Santi Martini, dr., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
2. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes., selaku Ketua Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
3. Ilham Aksanu Ridlo, SKM.,M.Kes selaku dosen pembimbing magang Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan
4. Lara Rizka selaku Chief Tobacco Control CISDI dan pembimbing lapangan di Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).
5. Orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan sehingga laporan magang dapat terselesaikan dengan baik.
6. Teman sepermagangan (Aulia Seviera, Faradita, Aisyah Rahvy, Devi Ultima, dan Silvia Okta) yang senantiasa bertukar pikiran dan memberikan semangat selama magang berlangsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga laporan magang ini berguna baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Surabaya, 28 Februari 2021

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan Magang | 2 |
| 1.1.1 Tujuan Umum | 2 |
| 1.1.2 Tujuan Khusus | 2 |
| 1.3 Manfaat Magang | 2 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 3 |
| 2.1 Rokok dan Dampaknya Terhadap Bidang Kesehatan | 3 |
| 2.1.1 Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan Tubuh Manusia..... | 3 |
| 2.1.2 Dampak Konsumsi Rokok Bagi JKN | 4 |
| 2.2 Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok | 4 |
| 2.3 Political Mapping Untuk Pelaksanaan Strategi Advokasi | 6 |
| 2.3.1 Pelaksanaan Strategi Advokasi | 7 |
| BAB III METODE KEGIATAN | 9 |
| 3.1 Lokasi Magang..... | 9 |
| 3.2 Waktu Pelaksanaan Magang | 9 |
| 3.3 Metode Pelaksanaan..... | 9 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 10 |
| 3.5 Kerangka Operasional..... | 11 |
| 3.6 Output Kegiatan Magang | 11 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 12 |
| 4.1 Gambaran Umum Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).. | 12 |
| 4.1.1 Sejarah Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) | 12 |
| 4.1.2 Visi dan Misi..... | 13 |

| | |
|---|----|
| 4.1.3 Tugas, Peran, dan Fungsi | 14 |
| 4.1.4 Program Yang Dijalankan Oleh CISDI | 14 |
| 4.2 Gambaran Umum Divisi Tobacco Control | 17 |
| 4.2.1 Struktur Organisasi Tobacco Control Unit | 17 |
| 4.2.2 Program yang dijalankan Divisi Tobacco Control CISDI | 18 |
| 4.3 Political Mapping dan Strategi Advokasi di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)..... | 19 |
| 4.3.1 Proses Political Mapping di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). | 19 |
| 4.3.2 Strategi Advokasi di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). | 21 |
| 4.3 Political Mapping Kebijakan Cukai dan Harga Rokok..... | 24 |
| 4.4.1 Kategorisasi Political Mapping Kebijakan Cukai dan Harga Rokok..... | 26 |
| 4.4.2 Political Mapping Bagian eksekutif Kebijakan Cukai dan Harga Rokok..... | 27 |
| BAB V PENUTUP | 30 |
| 5.1 Kesimpulan | 30 |
| 5.2 Saran | 30 |
| DAFTAR PUSTAKA | 31 |
| LAMPIRAN..... | 32 |
| Lampiran 1. Struktur Organisasi Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). | 32 |
| Lampiran 2. Lembar Dokumentasi Kegiatan Magang..... | 33 |
| Lampiran 5. Surat Izin Magang | 40 |
| Lampiran 6. Surat Balasan Izin Magang dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). | 41 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul Tabel | Halaman |
|--------------|--|----------------|
| 3.1 | Timeline Kegiatan Magang di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) | 7 |
| 4.1 | Proses Advokasi Pertama Kebijakan Cukai Rokok Yang Dilakukan CISDI | 22 |
| 4.2 | Proses Advokasi Kedua Kebijakan Cukai Rokok Yang Dilakukan CISDI | 23 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Judul Gambar | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| 4.1 | Struktur Organisasi CISDI | 15 |
| 4.2 | Struktur Organisasi <i>Tobacco Control Unit</i> | 17 |
| 4.3 | Klarifikasi Argumen Pernyataan | 21 |
| 4.4 | Klarifikasi Argumen Pernyataan Lembaga Eksekutif | 21 |
| 4.5 | Data Political Mapping | 24 |
| 4.6 | 20 Dari 141 Organisasi dan Institusi yang Aktif Berbicara | 25 |
| 4.7 | Hasil Political Mapping | 26 |
| 4.8 | Hasil Political Mapping Bagian Eksekutif | 27 |

DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH

Daftar Singkatan

CISDI = Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang termasuk salah satu dengan tingkat konsumsi rokok terbesar di dunia. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh The Tobacco Atlas pada tahun 2014, Indonesia berada di peringkat ke 4 terbesar di dunia untuk hal jumlah batang rokok yang dikonsumsi. Penelitian juga membuktikan bahwa jumlah batang rokok yang dikonsumsi oleh perokok dengan umur diatas 15 tahun di Indonesia mengonsumsi 1.322 batang rokok per orang setiap tahunnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya tingkat konsumsi rokok di Indonesia mampu meningkatkan penerimaan negara. Tetapi, rokok memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan terlebih anak-anak dengan umur dibawah 15 tahun yang sudah mengonsumsi rokok (The Tobacco Atlas, 2014).

Setiap tahunnya terdapat lebih dari 217.400 orang yang meninggal akibat rokok, dan lebih dari 2.677.000 anak-anak dan 53.767.000 orang dewasa terus mengonsumsi rokok setiap hari. Tingginya tingkat konsumsi rokok di Indonesia dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya harga jual rokok di pasaran (Eriksen, et al., 2015). Tanggung jawab Pemerintah dalam mengendalikan tingkat konsumsi rokok tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pasal 6 ayat 1, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dengan adanya peraturan ini, telah jelas bahwa merupakan sebuah tanggung jawab bagi Pemerintah untuk mengendalikan tingkat konsumsi zat adiktif, salah satunya merupakan rokok.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis dalam pelaksanaan magang mengambil topik pembelajaran mengenai proses political mapping di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). Untuk melakukan pemetaan pernyataan argumentasi yang disampaikan oleh pejabat dan publik terkait kebijakan untuk menaikkan cukai rokok di Indonesia.

1.2 Tujuan Magang

1.1.1 Tujuan Umum

Mempelajari political mapping untuk upaya tobacco control di CISDI (Center For Indonesia's Strategic Development Initiatives)

1.1.2 Tujuan Khusus

- a. Mempelajari gambaran umum Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).
- b. Mempelajari gambaran umum Divisi *Tobacco Control* di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).
- c. Mengetahui *political mapping* dan strategi advokasi di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).
- d. Mempelajari proses *political mapping* untuk melakukan pemetaan argumentasi publik dan pejabat terkait kebijakan kenaikan cukai rokok untuk tobacco control di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

1.3 Manfaat Magang

a. Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan dalam kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.
2. Mengasah kemampuan hard skill dan soft skill yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan analisis kondisi lapangan.
3. Merasakan gambaran pelaksanaan dunia kerja yang dilakukan di instansi non pemerintahan.
4. Menambah pengalaman kerja mahasiswa.

b. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Terciptanya hubungan yang baik dan adanya pertukaran informasi antara Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Selain itu, dengan dilaksanakannya program magang diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang berkualitas dan siap untuk menjalani kehidupan kerja.

c. Bagi Instansi Magang

Mendapatkan tambahan sumber daya manusia untuk membantu pelaksanaan political mapping untuk upaya tobacco control di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rokok dan Dampaknya Terhadap Bidang Kesehatan

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacuni*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perokok adalah orang yang suka merokok. Perokok juga dibedakan dalam dua kategori yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok secara aktif, sedangkan perokok pasif adalah orang yang menerima asap rokok saja, bukan perokoknya sendiri (KBBI, 2018).

Pemerintah juga selalu berupaya dalam mengelola konsumsi rokok di Indonesia, sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan pada pasal 32 yang menyatakan bahwa Menteri dan Menteri terkait harus melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dengan cara:

1. Produk rokok memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:
 - a. Kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg.
 - b. Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud harus berdasarkan tata cara metode pemeriksaan yang berlaku.
2. Terwujudnya kawasan tanpa rokok.
3. Berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.

2.1.1 Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan Tubuh Manusia

Mengonsumsi rokok merupakan hal yang tidak baik untuk kesehatan. Rokok dapat menyebabkan terjadinya penyakit kronis bagi anak-anak Indonesia yang dapat menyebabkan kematian (WHO,2020). Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh

Centers for Disease Control and Prevention US yang dilansir dari situsnya, merokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan dapat menyebabkan penyakit sebagai berikut:

1. Meningkatkan terjadinya risiko untuk terkena kanker perut, kanker darah dan kanker limfa. Penyakit tersebut dapat terjadi karena efek samping kandungan yang ada di dalam rokok yaitu mengandung kadar 1,3-Butadine, yang merupakan bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi karet.
2. Menghambat perbaikan DNA pada tubuh sehingga membuat rusaknya lapisan pada paru-paru, dikarenakan efek samping kandungan pada rokok yaitu Akrolein, Formaldehida dan Kromium VI. Kandungan kimia tersebut biasa digunakan untuk membuat logam paduan, cat dan pewarna dan jika dikonsumsi terus menerus akhirnya dapat menyebabkan kanker paru-paru.
3. Menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker, karena rokok mengandung zat Arsenik yang digunakan untuk mengawetkan kayu.

2.1.2 Dampak Konsumsi Rokok Bagi JKN

Konsumsi rokok dan tembakau menjadi salah satu faktor utama terjadinya berbagai macam penyakit. Beberapa golongan berpendapat bahwa merokok cukup berbahaya untuk kesehatan, baik perokok aktif maupun pasif karena rokok mengandung zat beracun yang banyak di dalamnya. Menurut sumber berita yang di terbitkan oleh Republika mengutip pernyataan dari Kementerian Kesehatan (2011), bahwa banyak artikel ilmiah yang membuktikan hubungan kausalitas antara merokok dengan timbulnya berbagai penyakit, seperti kanker, jantung, saluran pernafasan, reproduksi, dan kehamilan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan, terdapat lebih dari 5.159.627 kasus merokok dan penyakit terkait tembakau pada pasien rumah sakit di tahun 2017. Jutaan kasus yang disebabkan oleh paparan rokok tersebut membebani BPJS hingga lebih dari Rp 5,3triliun.

2.2 Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang

dimaksud cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sifat atau karakteristik yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 2 undang-undang ini dimana barang-barang tertentu akan dikenai cukai jika mempunyai sifat atau karakteristik:

1. konsumsinya perlu dikendalikan
2. peredarannya perlu diawasi
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai pasal 4 menjelaskan bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:

1. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Perubahan dari harga sebuah barang bisa mempengaruhi tingkat konsumsi barang tersebut terlebih jika barang tersebut adalah barang yang adiktif. Kenaikan harga yang akan dikompensasikan ke sebuah barang adiktif tidak hanya bisa mengurangi konsumsi untuk saat ini, tetapi konsumsi untuk di masa depan juga akan terpengaruh dalam tingkat yang jauh lebih besar (becker dan Murphy, 1988). Dalam pengendalian konsumsi rokok, pemerintah telah meningkatkan tarif cukai rokok secara simultan sejak tahun 2009 sampai sekarang

Salah satu upaya Pemerintah untuk mengendalikan tingkat pembelian dan konsumsi rokok di Indonesia yaitu menggunakan elemen kebijakan perpajakan atau biasa disebut PPN dan cukai. Menurut penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, menyatakan bahwa pajak tembakau merupakan tindakan pengendalian tembakau yang

paling efektif untuk dapat memberhentikan konsumsi rokok, mencegah inisiasi, dan mengurangi konsumsi. Lebih dari 100 studi yang didapat dari negara-negara industri menghasilkan bukti konsisten yang menunjukkan bahwa harga rokok yang lebih tinggi yang dihasilkan dari kenaikan cukai menyebabkan penurunan merokok yang signifikan (Chaloupka, et al, 2010). Berturut-turut, tarif cukai rokok mengalami kenaikan sebesar 8,72 persen pada tahun 2015 atau awal pemerintahannya di periode pertama. Selanjutnya di tahun 2016, cukai rokok kembali naik sebesar 11,19 persen. Berturut-turut cukai produk tembakau ini kembali naik pada tahun 2017, 2018, dan 2019 sebesar masing-masing 10,54 persen, 10,04 persen, dan 10,04 persen. (Kompas, 2020).

2.3 Political Mapping Untuk Pelaksanaan Strategi Advokasi

Political mapping atau pemetaan politik dapat dilakukan selama tahap perencanaan awal untuk memberikan kejelasan dengan membantu memahami proses sebuah regulasi yang akan dikembangkan atau sebuah kebijakan yang akan di implementasikan. Political mapping dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk terlibat dalam mempengaruhinya pembuatan keputusan kebijakan. Political mapping merupakan Teknik yang di terapkan pada sebuah kampanye yang dapat difokuskan pada peraturan baru, menerbitkan sebuah perintah eksekutif, mengubah anggaran atau meminta penegakan yang diperkuat.

Political mapping secara umum memiliki outline sebagai berikut:

1. *The right type: Political map* harus di sesuaikan dengan tujuan kebijakan yang akan di lakukan.
2. *Direction: Political map* harus melacak proses kebijakan dari awal sampai akhir, tidak bisa jika mulai dari tengah data.
3. *Up to date information: Political map* harus berisi informasi terkini, tahun-tahun dapat berlalu dari awal kampanye hingga akhir dan pengambilan keputusan bisa berubah sehingga political map harus di update setiap tahunnya.
4. *The right amount of information: Political map* tidak memerlukan setiap badan atau departemen pemerintah, hanya yang berhubungan dengan tujuan kebijakan yang akan dilakukan.
5. *Easy to read: Political map* harus mudah dibaca dan mengerti.

Menurut Departemen Kesehatan Republic Indonesia proses pelaksanaan *political mapping* adalah untuk mempermudah langkah identifikasi dan analisis pada proses advokasi karena dalam proses *political mapping* akan didapatkan hasil yang digunakan untuk mengetahui posisi *stakeholder* dalam menanggapi isu tertentu (mendukung atau tidak) dilihat dari argumentasi dan tindakan *stakeholder* tersebut. Sehingga untuk kelanjutannya, penyusunan strategi advokasi juga dipermudah karena telah diketahui sekutu atau lawan yang kuat dan berpengaruh serta peluang untuk mendapatkan dukungan.

2.3.1 Pelaksanaan Strategi Advokasi

Tujuan dan sasaran advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik. Dengan kata lain, advokasi sebenarnya hanyalah salah satu dari perangkat sekaligus proses – proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sehingga advokasi hanyalah bertujuan mengubah, menyempurnakan atau bahkan membela suatu kebijakan publik tertentu (Pratomo, 2013).

Advokasi pada dasarnya adalah suatu tindakan yang digunakan untuk mengubah kebijakan, posisi atau program dari berbagai institusi maupun lembaga di tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional. Sasaran advokasi memang hanya tertuju atau terarah pada kebijakan publik, dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada satu kebijakan tertentu akan membawa dampak positif atau paling tidak sebagai titik awal dari perubahan – perubahan yang lebih besar secara bertahap maju (Topatimasang, 2001).

Dalam advokasi terdapat strategi yakni :

1. Strategi Proaktif

Yakni upaya yang dilakukan oleh kelompok advokator yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan, perundangan, peraturan dan produk hukum lainnya disahkan secara hukum. Dalam konteks ini pejuang advokasi berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang mendukung maupun yang menghambat sebelum kebijakan hukum diterbitkan oleh instansi

yang berwenang (legislatif, eksekutif dan organisasi lain yang relevan). Advokasi yang proaktif disini disebutkan tiga strategi, yaitu lobi, rapat dengar pendapat dan kampanye (Pratomo, 2013):

- a. Lobi (Lobbying). Lobi adalah sebuah peran advokasi dimana pelaku advokasi terlibat langsung didalam sebagai seorang peserta yang langsung terlibat memengaruhi lahirnya kebijakan
- b. Dengar Pendapat (Rapat Dengar Pendapat/Public Hearing). Dengar pendapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertemuan yang diadakan untuk mendengarkan penjelasan atau pendapat seseorang yang berwenang mengenai pelaksanaan kegiatan dan sebagainya yang ada dalam batas tugas dan kewenangan misalnya anggota masyarakat, lembaga atau badan pemerintah
- c. Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan masa pemilih dalam pemugutan suara. Menurut Mastuti dan Kartikasari kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensosialisasikan wacana, ide, pandangan kita terhadap suatu kebijakan atau suatu kasus tertentu yang bertujuan untuk mendapat dukungan publik.

2. Strategi Reaktif

Strategi reaktif adalah strategi dimana pekerja advokasi berupaya mengubah kebijakan setelah kebijakan, perundangan, peraturan dan sebagainya yang telah ditetapkan secara hukum. Teknik yang digunakan dalam advokasi bentuk ini yaitu demonstrasi, boikot, revolusi, gugatan kelas (class action), hak gugat organisasi (legal standing) dan judicial review.

BAB III

METODE KEGIATAN

3.1 Lokasi Magang

Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, maka kegiatan magang dilaksanakan secara daring untuk menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19.

3.2 Waktu Pelaksanaan Magang

Rincian waktu yang digunakan selama kegiatan magang berlangsung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Timeline Kegiatan Magang di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)

| Kegiatan | Januari | | | | Februari | | | | Maret | |
|--|---------|----|-----|----|----------|----|-----|----|-------|----|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II |
| Pembuatan proposal | | | | | | | | | | |
| Perizinan magang | | | | | | | | | | |
| Pengenalan tempat magang | | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan Magang | | | | | | | | | | |
| Supervisi dosen pembimbing magang | | | | | | | | | | |
| Pembelajaran political mapping di tobacco control unit | | | | | | | | | | |
| Pembuatan laporan magang | | | | | | | | | | |
| Seminar hasil laporan magang | | | | | | | | | | |

3.3 Metode Pelaksanaan

Metode yang akan digunakan dalam kegiatan magang ini antara lain:

1. Ceramah

Pemberian arahan sebelum pelaksanaan kegiatan magang oleh Pembimbing Instansi dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

2. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan political mapping yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

3. Partisipasi Aktif

Belajar dan bekerja secara aktif untuk melatih keterampilan dan kemampuan dalam bekerja sama dengan tim CISDI dengan melakukan political mapping untuk upaya tobacco control.

4. Studi Literatur

Kegiatan pembelajaran melalui berbagai sumber referensi seperti berita atau literatur terkait.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji data dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) yang berkaitan dengan upaya tobacco control dengan berfokus kepada kebijakan cukai dan harga rokok

3.5 Kerangka Operasional



Gambar 3.1 Kerangka Operasional Kegiatan Magang

3.6 Output Kegiatan Magang

Setelah kegiatan magang dilakukan, diharapkan terdapat hasil/output sebagai berikut:

1. Gambaran umum Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).
2. Gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).
3. Gambaran *political mapping* di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).
4. Usulan perbaikan untuk gambaran *political mapping* di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

CISDI adalah organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang setara, berdaya, dan sejahtera dengan paradigma yang sehat. Melalui program-programnya, CISDI berupaya untuk menjadi jembatan penting antara kebutuhan kesehatan masyarakat dan pemanfaatan pemberian layanan di bawah payung jaminan kualitas.

Terdiri dari para profesional yang antusias yang sebagian besar berada di belakang bekas Kantor Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk MDGs, CISDI mewarisi tim yang terdiri dari orang-orang dengan pengetahuan diam-diam tentang proses SDGs dan posisi terbaik di lembaga pemerintah. Terlibat dalam berbagai perumusan dan implementasi agenda pembangunan, CISDI memiliki jaringan yang kuat untuk lebih mengembangkan kemitraan multisektor.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang meluas, setara, dan berkelanjutan, CISDI memfasilitasi dan mendorong kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi melalui:

1. Membangun dan membina kemitraan strategis, sekaligus memastikan kolaborasi antar masyarakat dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan,
2. Menghubungkan upaya pembangunan di tingkat akar rumput dengan semua pemangku kepentingan terkait,
3. Merancang dan melaksanakan intervensi yang berdampak langsung dan luas kepada masyarakat,
4. Mendorong perbaikan kebijakan publik.

4.1.1 Sejarah Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)

Perjalanan CISDI dimulai pada tahun 2010 pada era Millennium Development Goals (MDGs), di mana dunia sepakat untuk berjuang mencapai delapan tujuan pembangunan: pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; mencapai pendidikan dasar universal; mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; mengurangi kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya; memastikan kelestarian lingkungan, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Diawali oleh Menteri Kesehatan yang saat itu menjabat yaitu Nila Moeloek, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Millenniums Development Goals (OSE-MDGs) diberikan mandat untuk memfasilitasi koordinasi upaya pencapaian MDG dari kementerian terkait dan pemerintah daerah dan sekaligus bertindak sebagai katalis pendorong di antara berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.

Setelah MDGs mencapai batas waktu kerja efektifnya yang berakhir pada akhir 2015, mereka menyelesaikan tugas resminya sebagai lembaga pemerintah. Tim, yang dilengkapi dengan pengetahuan diam-diam tentang MDGs, ditransfer dari peran organisasi sebelumnya sebagai bagian dari OSE-MDGs ke dalam Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) yang independen. Melanjutkan kerangka SDGs, CISDI telah menjelajahi area yang sebelumnya kurang dieksplorasi dalam sektor kesehatan dan kesejahteraan; didukung dengan dewan penasihat yang terdiri dari para ahli dengan reputasi cemerlang dari instansi pemerintah, lembaga akademik, dan organisasi profesi kesehatan.

Berafiliasi dengan Koalisi CSO Indonesia tentang SDGs, CISDI memiliki jaringan yang kuat untuk lebih mengembangkan kemitraan multisektor. CISDI terus menghasilkan hasil berkualitas tinggi dalam proyek-proyek termasuk perencanaan strategis untuk advokasi kebijakan terkait kesehatan masyarakat, kampanye publik tentang berbagai masalah pembangunan, dan memprakarsai dan mengelola program Pencerah Nusantara yang memenangkan Penghargaan Perak Global Open Government Awards 2015 untuk peningkatan pelayanan publik melalui praktik tata kelola yang baik.

Melalui program dan kegiatan kami, kami berusaha untuk menyediakan jembatan kritis antara kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan penyampaian layanan publik di bawah payung memastikan kualitas.

4.1.2 Visi dan Misi

a. Visi

Visi Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang setara, berdaya, dan sejahtera dengan paradigma sehat

b. Misi

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) memiliki misi sebagai berikut:

1. Mendorong kemitraan strategis dan menjamin kolaborasi semua

- pemangku kepentingan dalam mencapai target pembangunan
2. Mendorong penguatan implementasi kebijakan berwawasan Kesehatan
 3. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan masyarakat akar rumput dalam isu pembangunan
 4. Mendorong pemerataan akses terhadap layanan Kesehatan
 5. Membangun kesadaran masyarakat Indonesia berdasarkan paradigma sehat

4.1.3 Tugas, Peran, dan Fungsi

Dalam masa jabatannya yang relatif singkat, CISDI dengan cepat mengembangkan keahlian yang berharga untuk mendukung visinya dalam memastikan masyarakat yang setara, berdaya, dan sejahtera berdasarkan paradigma kesehatan. Diperkuat oleh kapasitas stafnya di bidang kesehatan masyarakat, penelitian kuantitatif dan kualitatif, analisis kebijakan, manajemen sumber daya manusia, komunikasi, dan advokasi, CISDI mengoptimalkan sumber dayanya untuk menjadi pencipta dan pelaksana inisiatif terkait kesehatan.

4.1.4 Program Yang Dijalankan Oleh CISDI

a. Pencerah Nusantara

Pencerah Nusantara adalah program yang dilaksanakan pada puskesmas berbasis masyarakat di daerah / kota tertinggal. Program ini bertujuan untuk merevitalisasi pusat layanan kesehatan primer dengan mengerahkan tim profesional kesehatan yang dilengkapi dengan keterampilan yang relevan untuk melibatkan pemangku kepentingan utama dan mengembangkan kapasitas penyedia kesehatan lokal.

Program ini dirancang untuk mengubah wajah kesehatan bangsa melalui reformasi pelayanan publik di bidang kesehatan menjadi lebih berkeadilan, dengan menjangkau mereka yang paling rentan. Visi ini memperluas batas pelayanan publik dari menghasilkan kebijakan hingga memastikan implementasi kebijakan yang berbeda. Dengan pengaturan geografis kepulauan Indonesia - 17.000 + pulau, 254 juta orang, pelayanan publik yang adil tetap menjadi tantangan nasional yang signifikan, membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

Dengan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal, termasuk dalam kegiatan promosi kesehatan, intervensi perbaikan gizi, dan perawatan medis dasar, Pencerah Nusantara memastikan setiap intervensi terukur dan dipantau dengan baik. Setelah tahun ketiga pelaksanaan Pencerah Nusantara, program tersebut secara signifikan telah meningkatkan manajemen puskesmas dan memberikan manfaat bagi 120.000 anggota masyarakat di semua lokasi penyebaran.

Selain itu, pelaksanaan Pencerah Nusantara telah membangun jaringan banyak mitra - keterlibatan dan kolaborasi antar komunitas dengan berbagai pemangku kepentingan (filantropi, swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta media). Jaringan mitra ini terus menguat dan berkembang seiring dengan model program.

b. Generasi Kreatif: Penggerak Nusantara

Salah satu tantangan kesehatan yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia adalah fakta bahwa kita memiliki jumlah perokok muda tertinggi di dunia. Global Youth Tobacco Survey menemukan 1 dari 5 remaja Indonesia usia 13-15 tahun pernah mencoba merokok. Meskipun iklan, promosi, dan sponsor rokok tersebar luas dan dianggap oleh remaja mendorong mereka untuk mulai merokok, kebijakan pengendalian tembakau yang berfokus pada pencegahan merokok remaja masih langka. Mengingat beban kesehatan dan sosial ekonomi yang semakin meningkat akibat penyakit akibat merokok, CISDI merancang gerakan pendidikan sebaya untuk meningkatkan kesadaran remaja Indonesia tentang dampak merokok, dan bagaimana kaum muda menjadi sasaran. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, CISDI telah mendidik 628 siswa di lima sekolah di Jakarta dan sekitarnya.

c. Asia-Pacific Food Forum

Dunia menghadapi tantangan mendasar dalam memberi makan makanan sehat secara berkelanjutan kepada setidaknya sembilan miliar orang pada tahun 2050. Sebagai salah satu kawasan terpadat di dunia, Asia Pasifik sedang berjuang untuk memerangi deforestasi, polusi udara, kekurangan gizi dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Pola makan yang tidak sehat dan sistem pangan global yang ada saat ini telah menyebabkan meningkatnya angka penyakit tidak menular serta dampak lingkungan yang negatif.

Indonesia, dipimpin oleh Kementerian Kesehatan, akan menjadi tuan rumah Asia Pacific Food Forum, forum pangan pertama di Asia Pasifik yang bertujuan untuk merancang solusi bersama dalam mengatasi tantangan pangan. Forum ini akan diadakan di Jakarta pada 30-31 Oktober 2017 dan akan mengundang lebih dari 500 ilmuwan, dunia usaha, akademisi dan masyarakat sipil. CISDI akan bertindak sebagai mitra pelaksana bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan EAT, sebuah inisiatif global yang setiap tahun menyelenggarakan Forum Makanan Stockholm

d. Tobacco Control

Saat ini, CISDI ditempatkan secara strategis di komite untuk APACT 12 mendatang di 2018, diselenggarakan oleh Indonesia, konferensi pengendalian tembakau internasional pertamanya. Tema APACT ke-12 adalah “Pengendalian Tembakau untuk Pembangunan Berkelanjutan: Memastikan Generasi Sehat”, yang akan menjadi momentum positif untuk memanfaatkan upaya ini sebagai kepedulian dan keseriusan Indonesia dalam mencapai SDGs pada tahun 2030 dan melindungi generasi mudanya. Hal ini mendukung keterlibatan CISDI dalam gerakan pengendalian tembakau sebagai bagian kecil dari tujuan yang lebih besar untuk membantu mendorong kerangka peraturan dan kelembagaan di dalam pemerintah pusat untuk mengarusutamakan SDGs dalam Rencana Jangka Panjang Nasional Indonesia. Pada konferensi yang akan datang ini, CISDI akan dilibatkan dalam semua tahapan persiapan menuju acara tersebut, baik dari sisi implementasi maupun dari sisi perencanaan strategis untuk melihat momentum untuk menampilkan prestasi Indonesia dalam pengendalian tembakau di sebuah tribun.

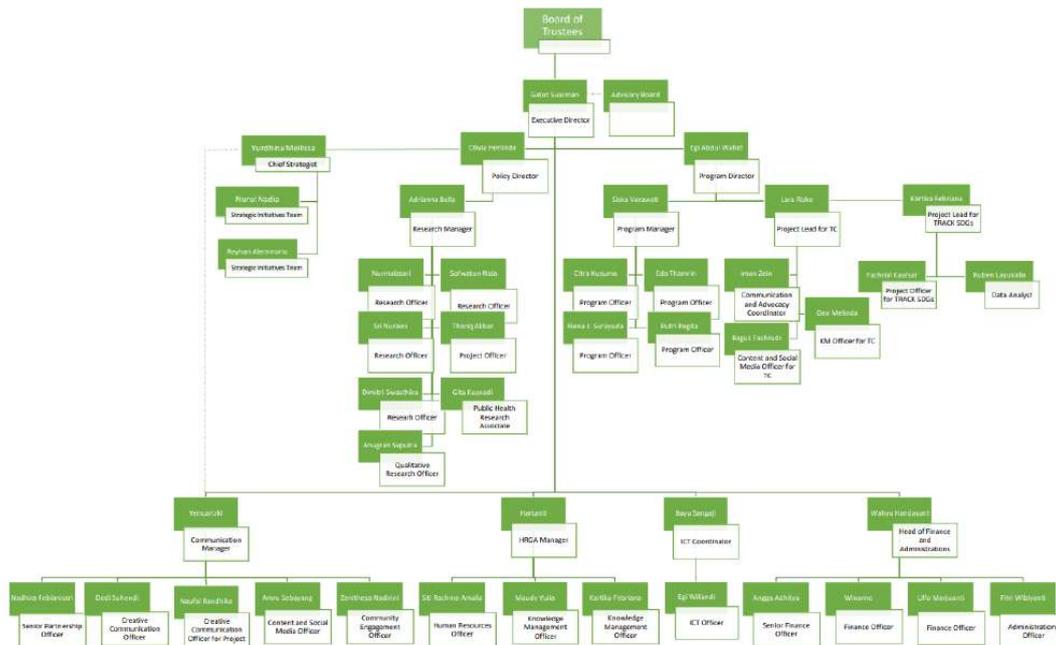
e. SDGS Actor Mapping Development

Percaya pada kemitraan kolaboratif sebagai jalur cepat untuk realisasi SDGs di Indonesia, CISDI memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkembang pesat untuk lebih mengembangkan kemitraan multi-sektor. Saat ini, jaringan aktor non-negara mampu mengkonsolidasikan dan membuka potensi kolaborasi dalam platform online yang disebut TRACK SDGs. Menyediakan peta, informasi, dan pengembangan kapasitas offline aktor non-negara pengetahuan SDGs di antara aktor non-negara, inisiatif ini tumbuh untuk membantu proses

pelacakan realisasi SDGs melalui inisiatif NSA di Indonesia.

4.1.5 Struktur Organisasi Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

Berikut ini adalah struktur organisasi Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi CISDI

4.2 Gambaran Umum Divisi Tobacco Control

4.2.1 Struktur Organisasi Tobacco Control Unit



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Tobacco Control Unit

4.2.2 Program yang dijalankan Divisi Tobacco Control CISDI

Beberapa program yang dijalankan oleh divisi Tobacco Control CISDI pada tahun 2021 meliputi:

1. *Political Mapping*

Merupakan demonstrasi pemetaan argumentasi melalui media massa berupa pemberitaan dalam kurun waktu tertentu. Hasil pemetaan didiskusikan dengan organisasi lain dan kemudian digunakan untuk merumuskan strategi advokasi terkait kenaikan cukaz dan / atau penyederhanaan cukai rokok.

2. *Routine content @sebelahmata_cisdi*

Konten rutin diupload di instagram @sebelahmata_cisdi sebagai bentuk advokasi melalu sosial media terkait isu rokok. Konten yang diupload dalam berbagai macam bentuk, diantaranya:

1. Manuskrip Sebelah Mata

isinya bercerita tentang empat karakter dengan kemampuan khusus, dan kemudian menghubungkan karakter tersebut dengan teori, peristiwa, berita, dan penelitian pengendalian tembakau.

2. Rectoverso

majalah mini yang menghubungkan isu-isu pengendalian tembakau dengan beberapa analogi lain yang mendeskripsikan berita dan fakta pengendalian tembakau.

3. Perang Berita

Adalah konten video yang membedah berita berita yang ada di media terkait pengendalian tembakau.

4. Its News

Adalah postingan berita yang bersifat satir, dengan merubah sudut pandang dari pemberitaan asli tanpa merubah substansi berita. Biasanya menyuguhkan kejuaraan Indonesia dalam hal yang buruk, misalnya Indonesia juara dua penghasil limbah puntung rokok di dunia.

5. Vinyl Story

Adalah konten berbentuk percakapan dua orang yang saling melempar tanya terkait dan keresahan terkait isu *tobacco control*.

3. *Tobacco Tax and Pricing Knowledge Hub*

Penerima dapat menggunakan platform untuk membuat daftar pengetahuan produk di log pengetahuan dan mengunggah pengetahuan produk secara teratur setiap bulan. Hal ini diharapkan dapat memudahkan penerima dalam menggunakan produk yang sudah diproduksi dan melacak produk yang sudah atau belum diluncurkan.

4. *Phone Survey: The Economic Impacts of COVID-19 Pandemic on Cigarette Consumption Pattern in Indonesia.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap pola konsumsi dan perilaku merokok Indonesia dalam hal pekerjaan, pendapatan, tingkat stres, dan pengetahuan tentang COVID-19.

5. *CISDI Magazine & capacity building for youth*

Ini adalah majalah reguler yang diproduksi oleh CISDI, yang berisi tentang isu-isu kesehatan yang dipelajari CISDI agar semenarik mungkin. Majalah CISDI Vol.2 akan mengundang kaum muda terpilih (dari IYCTC atau anggota baru) untuk berpartisipasi dalam produksinya, dan pertemuan peningkatan kapasitas akan diadakan sebelum produksi.

6. *Documentary Movie*

Film dokumenter mengenai masalah tembakau, dan CISDI berencana membuat film bekerja sama dengan jurnalis pada tahun 2021.

7. *Engaging Youth spokespersons*

Kegiatan pengadaan menunjuk pemuda Indonesia sebagai juru bicara untuk membahas masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang diangkat akan disesuaikan dengan majalah CISDI.

4.3 Political Mapping dan Strategi Advokasi di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

4.3.1 Proses Political Mapping di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

Proses political mapping yang dilakukan di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) merupakan serangkaian proses untuk memetakan argumentasi publik dan pejabat yang memiliki tujuan utama untuk

menganalisa argument setuju ataupun tidak setuju perihal kenaikan cukai dan harga rokok untuk mengurangi konsumsi rokok di Indonesia

Adapun tahapan dari proses political mapping yang dilakukan yakni:

1. Mengumpulkan data yang terdiri dari berita yang berkaitan dengan isu cukai rokok di Indonesia dari bulan Januari – Desember 2020. CISDI telah bekerja sama dengan Daily Monitoring Report of CTFK (contoh berada di lampiran) yang membantu CISDI mengirimkan pemberitaan mengenai isu rokok melalui email. Memeriksa setiap link berita yang dicantumkan dalam Daily Monitoring Report untuk memastikan adanya argumentasi dari *stakeholder* tertentu terkait isu cukai rokok.
2. Menginput pernyataan argumentasi yang telah dari *database* selama periode tahun 2020 secara urut dari bulan Januari-Desember. Pemberitaan yang mencantumkan argumentasi (berisi persetujuan/tidak ataupun pendapat tertentu) dari *stakeholder* diinput pada *sheet* pernyataan.
3. Menentukan orang yang berpendapat (spoken person) yang terpapar dalam setiap berita tersebut.
4. Mengklasifikasi argumentasi berdasarkan tanggal penerbitan, media yang menerbitkan, judul artikel, nama penulis, pernyataan argumentasi, nama spoken person, asal institusi atau organisasi dan jabatan.

| Pernyataan | Nama orang | Institusi/ Organisasi | Divisi/ Direktorat | Jabatan |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| "Saya kira ini in-line saja dengan policy kenaikan tarif rokok konvensional. Kalau rokok konvensional dinaikkan, ini (vape) juga akan mengikuti dan saya rasa pemberlakuan nya bisa paralel di 1 Januari 2020," | Heru Pambudi | Kementerian Keuangan | Direktoral Jenderal Bea dan Cukai | Direktur Jenderal |

Gambar 4.3 Klasifikasi Argumen Pernyataan

5. Menganalisis argumen per kategori berdasarkan inti sari pernyataan.
6. Menganalisis persetujuan atau tidak setujunya argumen atas kebijakan kenaikan cukai berdasarkan inti sari pernyataan.
7. Mengumpulkan semua data yang ditemukan dan melakukan paparan temuan tersebut setiap minggunya kepada tim.
8. Setelah semua pemberitaan harian telah terinput ke *database*, maka dibuatlah kategori dari argumentasi dan informasi yang ada
9. Selanjutnya untuk *political mapping* bagian eksekutif secara garis besar prosesnya meliputi memetakan argumentasi dari *stakeholder* baik di lembaga eksekutif terkait isu cukai rokok pada tahun 2020 dengan pernyataan yang diberikan. Berdasarkan *statement media* dan *insight stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi *pro*, *contra*, *normative*, *no statement*, dan *mixed*.

| Pro | Normative | No statement | Mixed | Contra |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| Bappenas | Kementerian Keuangan | Kementerian Perdagangan | Kemendagri | Kementerian Perindustrian |
| Kemendagri | Presiden | Kementerian Pertanian | | Kementerian Ketenagakerjaan |
| Kementerian Kesehatan | Wakil Presiden | | | |
| Kementerian PP-PA | | | | |
| TNP2K | | | | |
| BKKBN | | | | |

G

Gambar 4.4 Klasifikasi Argumen Pernyataan Lembaga Eksekutif

4.3.2 Strategi Advokasi di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

Stakeholder merupakan setiap kelompok atau individu yang mempengaruhi atau terpengaruh oleh kegiatannya. Setiap kelompok atau individu yang dapat membantu memberikan nilai awal pada sebuah organisasi. Ada dua unsur utama dalam melakukan advokasi yaitu analisis *stakeholder* dan perencanaan *stakeholder*. Analisis *stakeholder* merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang atau institusi kunci untuk memenangkan sebuah program atau proyek dan

melakukan perencanaan *stakeholder* berguna untuk membangun kesuksesan terhadap sebuah program (Krick, T. *et al.* 2005).

| No | Proses Pembuatan Kebijakan Cukai Rokok | Penjelasan Kegiatan | Respon CISDI | Bulan Pelaksanaan |
|----|---|---|--|-------------------|
| 1 | Pembuatan APBN | Kegiatan untuk merencanakan anggaran nasional untuk tahun depan | Melobi aktor utama yaitu Kementerian Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian dan berkonsultasi dengan lembaga legislative serta Bappenas. | Mei - Agustus |
| 2. | Menentukan besaran kenaikan tarif cukai yang dibutuhkan | Target kenaikan cukai ditentukan untuk meningkatkan penerimaan negara sesuai yang di harapkan | Melobi aktor utama yaitu Kementerian Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian | Agustus-September |
| 3. | Rapat konsultasi/ dengar pendapat | Setelah ditentukan target kenaikan tarif cukai rokok maka dilakukan rapat penentuan tarif cukai | Melobi aktor utama yaitu Kementerian Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian | Agustus-September |
| 4. | Keluarnya Permenkue tarif cukai | Rapat mengenai kenaikan tarif cukai di rapat cabinet Bersama presiden | Melobi aktor utama yaitu Kementerian Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian | Oktober-Desember |

Tabel 4.1 Proses Advokasi Pertama Kebijakan Cukai Rokok Yang Dilakukan CISDI

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui dalam proses advokasi CISDI akan melakukan pemetaan proses kegiatan – kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat kebijakan kenaikan cukai rokok pada setiap bulannya. Dan juga menentukan aktor utama yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada Bulan Mei – Agustus kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan APBN sehingga dibentuknya kegiatan rancangan anggaran nasional untuk tahun

depan dan rancangan pengeluaran serta target pendapatan untuk semua kementerian, dengan aktor utama yang berperan dalam perencanaan anggaran tersebut adalah Kementerian Keuangan (*Ministry of Finance/MoF*), Menteri Koordinator Perekonomian (*Coordinating Minister of the Economy/CMoE*) dan berkonsultasi dengan lembaga legislative serta Bappenas. Untuk bulan Agustus – September kegiatan yang dilakukan adalah menentukan besaran tarif cukai yang dibutuhkan dengan rincian untuk menentukan target pendapatan cukai untuk meningkatkan penerimaan negara sesuai yang di harapkan, dengan aktor utama yang berperan dalam perencanaan anggaran tersebut adalah Kementerian Keuangan (*Ministry of Finance/MoF*), Menteri Koordinator Perekonomian (*Coordinating Minister of the Economy/CMoE*) dan Kementerian Perindustrian (*Minister of Industry/MoI*). Setelah menentukan besaran cukai rokok kegiatan selanjutnya adalah rapat dengar pendapat yang akan dilakukan oleh internal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan dengan Pelaku Industri, Kementerian Keuangan dengan Kementerian lain yang terdampak dan RDP dengan komisi IX DPR. Pada bulan Oktober – Desember merupakan proses terbitnya Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan cukai rokok yang akan dibawa ke Rapat Kabinet terbatas bersama presiden.

| No | Proses Pembuatan Kebijakan Cukai Rokok | Respon CISDI | Bulan Pelaksanaan |
|----|--|--|-------------------|
| 1 | Proses pembuatan KEM-PPKF dan perencanaan anggaran kementerian | Mendekati BKF, menyiapkan champion di komisi XI untuk dapat mendorong kenaikan tarif cukai melalui RDP atau rapat mengenai RAPBN | Mei |
| 2. | Penyusunan APBN | Mendekati kementerian terdampak | Agustus-September |
| 3. | Pengesahan UU APBN | Pendekatan ke DJBC untuk mendapatkan update tentang proses penentuan tarif | September-Oktober |
| 4. | Keluarnya PMK tarif cukai | Ikut menghadiri RDP komisi XI tentang cukai jika terbuka untuk umum | Oktober-Desember |

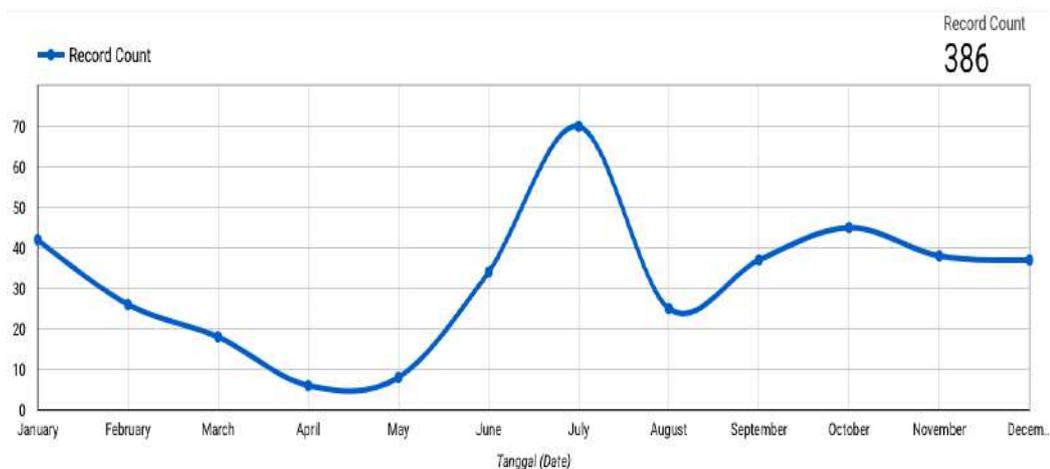
Tabel 4.2 Proses Advokasi kedua Kebijakan Cukai Rokok Yang Dilakukan CISDI

Berdasarkan tabel dapat diketahui selanjutnya dalam strategi advokasi yang dilakukan oleh CISDI dari bulan dengan melakukan lobi, yaitu sebuah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi (KBBI, 2018). Pada bulan Mei strategi advokasi yang dilakukan adalah mendekati BKF untuk mendorong adanya arahan tentang kebijakan cukai untuk mendorong pengurangan konsumsi di KEM-PPKF, *champion* di komisi XI untuk dapat mendorong kenaikan tarif cukai dan HJE melalui RDP ataupun sidang terkait RAPBN. Pada bulan Agustus akan mendekati Kementerian terdampak (Kemenkes, KemenPP-PA, Kemensos, Kementan, Kemenaker) yang akan dilibatkan dalam rapat antar kementerian. Pada bulan September melakukan pendekatan ke DJBC untuk mendapatkan update tentang proses penentuan tarif cukai. Pada bulan oktober melakukan mengikuti menghadiri RDP Komisi XI tentang cukai (jika terbuka untuk umum).

4.3 Political Mapping Kebijakan Cukai dan Harga Rokok

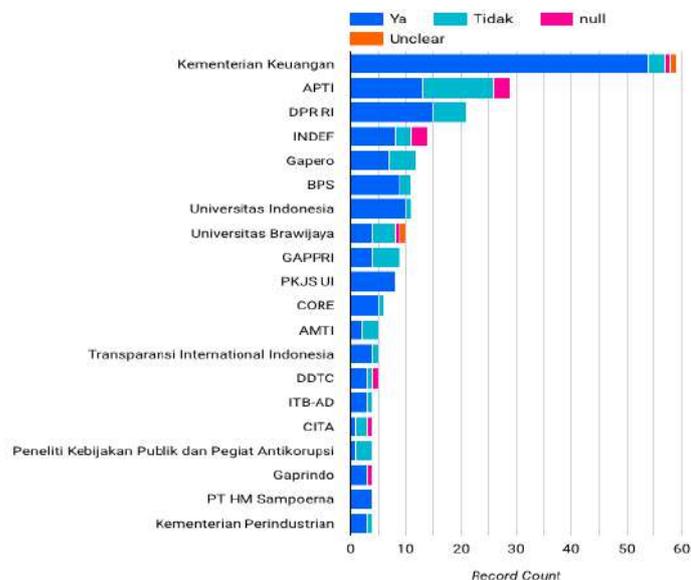
Dapat diketahui bahwa data yang didapatkan dari bulan Januari – Desember 2020 sebanyak 386 data yang terdiri dari berita-berita mengenai kebijakan cukai rokok di Indonesia secara keseluruhan data yang didapatkan mengalami kenaikan dan penurunan. Data yang tertinggi didapatkan pada bulan Juli dimana pada bulan tersebut mendekati rapat APBN yang akan dilakukan oleh kementerian.

Berikut ini adalah hasil political mapping yang dapat dilihat pada Gambar 4.5



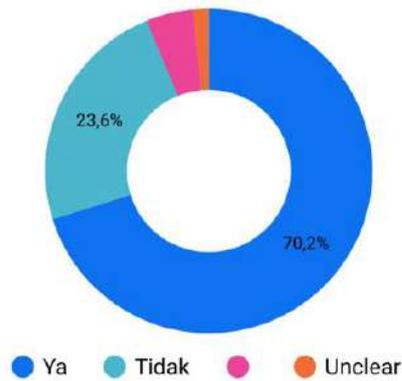
Gambar 4.5 Data Political Mapping

Berdasarkan Gambar 4.5 terdapat 42 data yang di dapat pada bulan Januari, 26 data pada bulan Februari, 18 data pada bulan Maret, 6 data pada bulan April, 8 data pada bulan May, 34 data pada bulan Juni, 70 data pada bulan Juli, 25 Data pada bulan Agustus, 37 data pada bulan September, 45 data pada bulan Oktober, 38 data pada bulan November dan 37 data pada bulan Desember. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 dari bulan Januari - Desember didapatkan 386 pernyataan argumentasi yang diberikan oleh pejabat ataupun publik. Ditemukan pernyataan argumentasi paling tinggi terdapat pada bulan Juli yaitu sebanyak 70 data, dan paling rendah ditemukan pada bulan April yaitu 6 data.



Gambar 4.6 20 dari 141 Institusi atau Organisasi yang aktif Bersuara

Berdasarkan gambar 4.6 telah diambil 20 dari 141 institusi atau organisasi yang aktif menyampaikan pernyataan terbanyak mengenai kebijakan untuk menaikkan cukai rokok. Yaitu kementerian keuangan, APTI, DPR RI, INDEF, Gapero, BPS, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, GAPRI, PKJS UI, CORE, AMTI, Transparansi International Indonesia, DDTS, ITB-AD, CITA, Peneliti Kebijakan Publik dan Pegiat Antikorupsi, Gaprindo, PT HM Sampoerna dan Kementerian Perindustrian. Dapat terlihat bahwa kementerian keuangan memiliki jumlah pernyataan terbanyak yaitu sebesar 59 pernyataan disampaikan yang 54 diantaranya pernyataan persetujuan kenaikan cukai rokok, sedangkan organisasi APTI merupakan organisasi yang memiliki jumlah pernyataan yang menolak untuk adanya kenaikan cukai rokok yaitu sebanyak 13 pernyataan yang disampaikan.



Gambar 4.7 Hasil Politiccal Mapping

Berdasarkan Gambar 4.7 dari keseluruhan 386 Data terlihat bahwa lebih banyak argumen dari pejabat ataupun publik yang menyetujui untuk adanya kenaikan cukai rokok. Sebesar 70,2% setuju untuk menaikkan cukai rokok dibandingkan dengan argumen yang tidak setuju jika cukai rokok dinaikan yaitu sebesar 23,6% dan 6,3% merupakan argumen yang tidak dapat di simpulkan jelas (*unclear* dan *null*).

4.4.1 Kategorisasi Political Mapping Kebijakan Cukai dan Harga Rokok

Hasil analisis kategori dari pernyataan setuju untuk menaikkan cukai dan harga rokok yang di paparkan oleh pejabat atau publik di media sosial berupa berita terkelompok menjadi beberapa kategori yaitu:

3. Harga rokok di Indonesia masih murah.
4. Kenaikan cukai rokok meningkatkan pendapatan negara.
5. Kenaikan cukai menurunkan beban ekonomi kesehatan.
6. Kenaikan cukai dapat menurunkan prevalensi perokok atau konsumsi rokok.
7. Kenaikan cukai mengurangi affordability atau akses membeli rokok.

Hasil analisis kategori dari pernyataan tidak setuju untuk menaikkan cukai dan harga rokok yang di paparkan oleh pejabat atau publik di media sosial berupa berita terkelompok menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Kenaikan cukai rokok dapat memicu kenaikan rokok ilegal.
2. Kenaikan cukai mengancam pengusaha lain yang terkait.
3. Kenaikan cukai mengancam petani dan pekerja industry tembakau.
4. Kenaikan cukai meningkatkan angka kemiskinan.

5. Kenaikan cukai meningkatkan inflasi.
6. Kenaikan cukai menurunkan daya beli masyarakat.
7. Kenaikan cukai meningkatkan pengawasan rokok illegal.
8. Kenaikan cukai menurunkan produksi rokok.
9. Kenaikan cukai dimasa pandemi akan membuat industri terpuruk.

4.4.2 Political Mapping Bagian eksekutif Kebijakan Cukai dan Harga Rokok

Political mapping bagian eksekutif adalah pemetaan pernyataan argumentasi yang dilakukan kepada kementerian atau lembaga pemerintah yang dilakukan dari bulan Januari – Desember 2020. Pernyataan yang di dapat akan di analisis dan di kategorikan menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Pro: Pendapat yang setuju dan sependapat dengan kenaikan cukai rokok.
2. Normative: Adalah pernyataan yang disampaikan berdasarkan pendapat tentang apa yang harus atau seharusnya terjadi.
3. No Statement: Tidak atau belum menyampaikan pendapat.
4. Mixed: Pendapat ambigu yang berada di antara pro dan kontra, atau pendapat tidak konsisten.
5. Contra: Pendapat yang tidak setuju dan tidak sependapat dengan kenaikan cukai rokok.

Dari data yang di dapat lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PP-PA, Kemenko Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, TNP2K dan BKKBN.

| Pro | Normative | No statement | Mixed | Contra |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Bappenas | Kementerian Keuangan | Kementerian Perdagangan | Kemenko Ekonomi | Kementerian Perindustrian |
| Kemenko PMK | Presiden | Kementerian Pertanian | | Kementerian Ketenagakerjaan |
| Kementerian Kesehatan | Wakil Presiden | | | |
| Kementerian PP-PA | | | | |
| TNP2K | | | | |
| BKKBN | | | | |

Gambar 4.8 Hasil Politiccal Mapping Bagian Eksekutif

Berdasarkan Gambar 4.11 telah di analisis pernyataan kementerian atau lembaga pemerintah berdasarkan kategori pro, normative, no statement, mixed dan contra. Untuk lembaga pemerintahan Bappenas, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian PP-PA, TNP2K dan BKKBN memberikan pernyataan pro yang berarti setuju dengan adanya kenaikan cukai rokok. Alasan pendapat yang setuju bahwa cukai rokok perlu dilakukan kenaikan adalah pertama karena bertambah parahnya konsumsi rokok di Indonesia karena pemerintah gagal menekan konsumsi rokok pada anak-anak sehingga konsumsi rokok pun dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Alasan kedua adalah masih terjangkaunya harga rokok karena masih tingginya pembelian rokok di masyarakat miskin jika rokok di naikan harganya maka akan lebih sulit untuk membeli rokok dan angka konsumsinya juga akan menjadi lebih rendah dan alasan lainnya.

Untuk lembaga pemerintahan Kementerian Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden masuk kedalam kategori dengan pendapat normative yang artinya pernyataan yang diberikan karena berdasarkan pendapat tentang apa yang apa yang seharusnya terjadi bukan karena pendapat pribadi seperti pernyataan yang di utarakan Presiden Republik Indonesia di media berita Ekonomi Bisnis tanggal 26 Oktober 2020, bahwa Joko Widodo telah mengarahkan jajarannya untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2021 di kisaran 13 persen - 20 persen. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo setuju menaikkan cukai rokok karena hasil rapat menyatakan untuk menaikkan cukai rokok, bukan karena pendapat pribadi sehingga pernyataan masuk kedalam kategori normatif.

Lembaga pemerintahan Kementerian perdagangan dan Kementerian Pertanian belum menyatakan pernyataan terkait perlunya kenaikan cukai rokok. Lembaga Pemerintahan Kemenko Ekonomi memiliki pendapat yang mixed yaitu berarti pendapat masih kurang jelas berada di antara setuju dan tidak setuju. Lembaga Pemerintah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan berpendapat kontra dengan alasan bahwa jika cukai rokok dinaikan maka industri rokok kecil yang akan kesulitan menyesuaikan, akibatnya terjadi pengurangan tenaga kerja. Apabila industri terus menurun, nanti dampaknya juga akan ke petani.

Dari paparan data sebelumnya maka hasil *political mapping* yang dilakukan untuk kebijakan kenaikan cukai rokok banyak di setuju oleh penjabat ataupun publik dengan hasil yang diperoleh 70,2% menyatakan kesetujuannya dan dari lembaga yang paling banyak bersuara untuk setuju adalah kementerian keuangan dan hanya 23,6% tidak setuju untuk adanya kenaikan pada cukai rokok dan kebanyakan dari lembaga yang bersuara adalah organisasi APTI.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran umum Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) meliputi: sejarah berdirinya umum CISDI, visi dan misi yang diterapkan oleh CISDI, peran, tugas, dan fungsi dari CISDI, program-program yang dijalankan oleh CISDI, Struktur Organisasi CISDI.
2. Perencanaan political mapping di tobacco control unit CISDI merupakan pemetaan pernyataan argumentasi mengenai kebijakan cukai rokok di Indonesia yang di suarakan oleh pejabat atau public.
3. Hasil political mapping menunjukkan dari 386 data yang di dapat sebesar 70,2% menyatakan setuju bahwa cukai rokok di Indonesia perlu dinaikan untuk mengurangi angka konsumsi rokok. Sedangkan sebesar 23,6% menyatakan tidak setuju bahwa cukai rokok di Indonesia perlu dinaikan karena akan merugikan petani tembakau serta meningkatnya PHK di pabrik rokok.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam meningkatkan pelaksanaan political mapping di Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) antara lain:

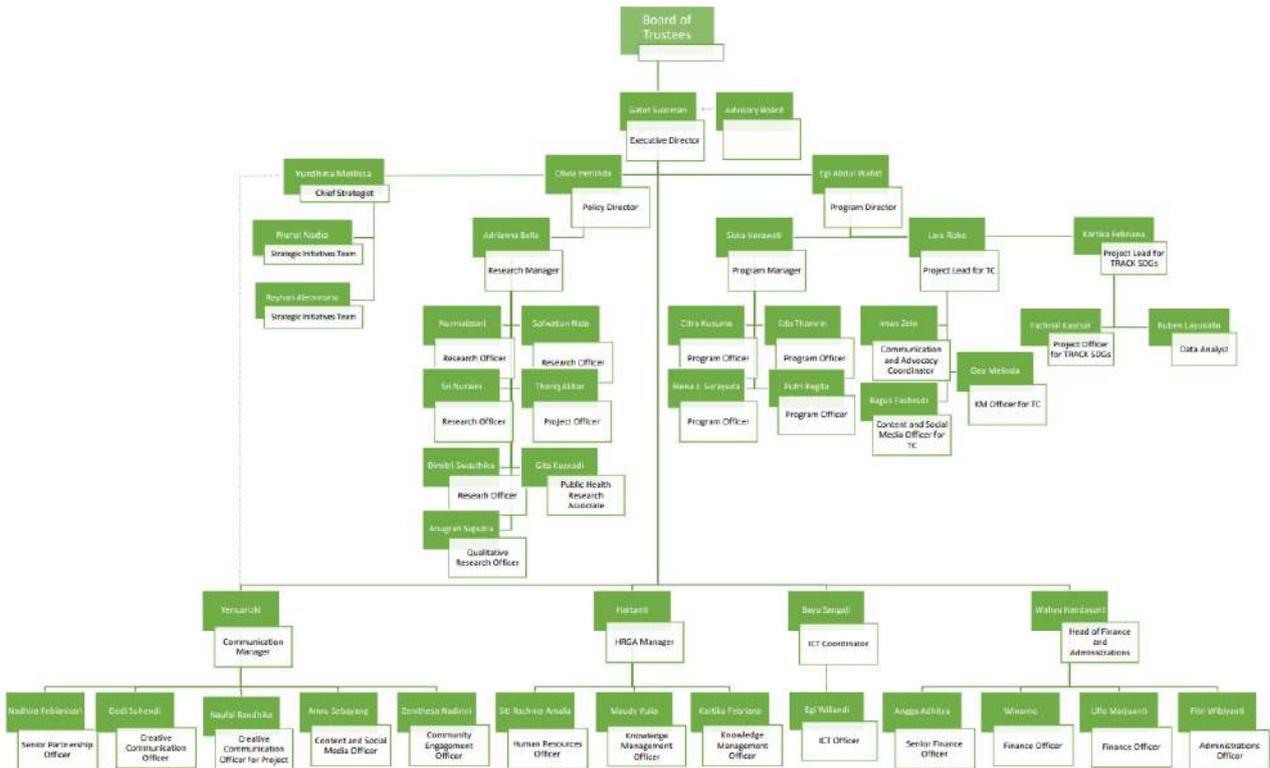
1. Selain penggunaan berita online sebagai data utama, dapat juga memperbanyak menggunakan berita koran.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, Gary S. dan Kevin M. Murphy. 1988. A Theory of Rational Addiction. *Journal of Political Economy*. Volume 96. Nomor 4.
- Centers for Disease Control and Prevention US. www.cdc.gov
- Chaloupka, Frank J., Deliana Kostova, and Ce Shang. 2010. Cigarette Excise Taxation: The Impact Of Tax Structure On Prices, Revenues, and Cigarette Smoking. National Bureau Of Economic Research, Working Paper, No 16287
- Eriksen, M., Mackay, J., Schluger, N. W., Islami, F., Drope, J., world lung foundation, & Atlas, T. T. (2015). *The Tobacco atlas*. The Tobacco Atlas, (Vol. 47).
- Idris, Muhammad. (2020). Sejak 2015, Jokowi Sudah Naikkan Cukai Rokok Diatas 70 Persen. <https://money.kompas.com/read/2020/01/04/152449326/sejak-2015-jokowi-sudah-naikkan-cukai-rokok-di-atas-70-persen?page=all>. Akses: 12 Maret 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. www.kbbi.kemdikbud.go.id
- Krick, T. *et al.* (2005) *The stakeholder engagement manual, The Guide to Practitioner's Perspectives on Stakeholder Engagement*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
- Pratomo, H. (2013) *Pendekatan dan Strategi Advokasi, Universitas Indonesia*.
- Topatimasing, Roem, dkk. 2001. *Merubah Kebijakan Publi: Panduan Pelatihan Advokasi Untuk Organisasi Non Pemerintah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- The Tobacco Atlas. 2014. www.tobaccoatlas.org.
- Toolkit, P. I. (no date) 'Policy Implementation Toolkit SUPPORTING TOOL : POLITICAL MAPPING FOR POLICY The Global Road Safety Partnership.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- WHO. 2003. *Framework Convention On Tobacco Control*. Geneva: World Health Organization
- WHO. 2004. *Tobacco Free Initiative. Building Blocks for Tobacco Control: a handbook*. Geneva: World Health Organization.

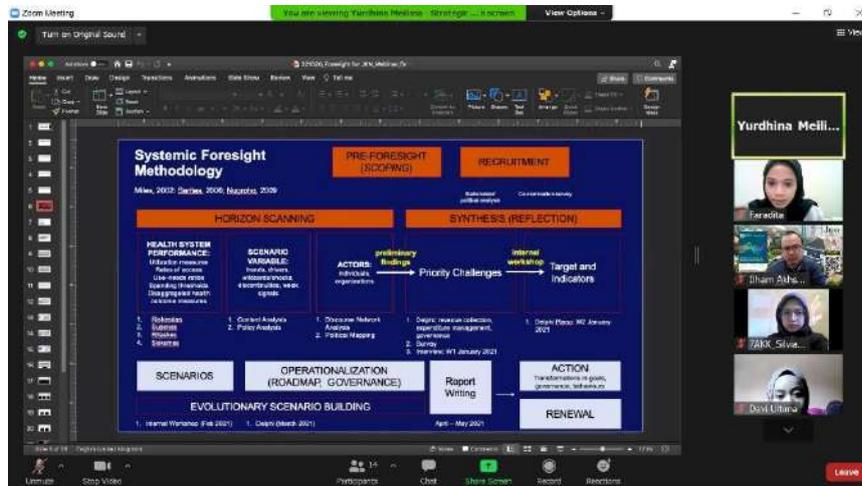
LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

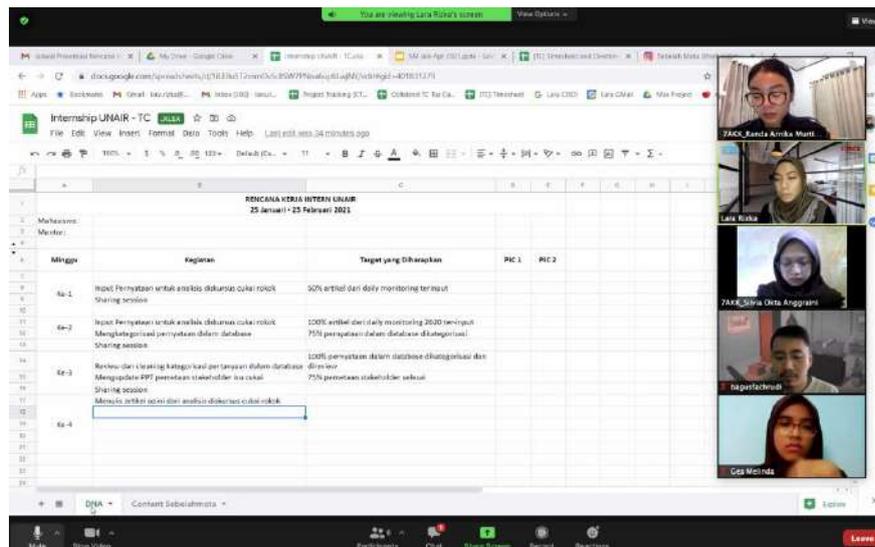


Lampiran 2. Lembar Dokumentasi Kegiatan Magang

Pembekalan Magang dan Pengenalan Tempat Magang



Perkenalan dengan Tim Tobacco Control



Rapat dengan Tim Tobacco Control

The screenshot shows a Zoom meeting window with a Gmail interface. The email content includes:

FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (ECTC)
TOBACCO BILL
COVID-19 AND TOBACCO CONTROL

| Date | Time | Status |
|-----------------|-------|----------|
| 20 January 2020 | 10:00 | POSITIVE |
| 20 January 2020 | 10:00 | POSITIVE |
| 20 January 2020 | 10:00 | POSITIVE |

BEWARE, TEENS THAT HAVE HOBBY IN VAPING ARE SEVEN TIMES AT RISK GETTING INFECTED BY COVID-19

Live conventional cigarettes, e-cigarettes also have the potential to cause various diseases. Recently, there is research suggested that vaping can increase the risk of being infected with the coronavirus by up to seven times for young people. The study which published in the journal of Adolescent Health in July 2020, analyzed more than 4,300 adolescents and young adults aged 13 to 24 in the United States. After studying and testing for various virus infections, researchers found that e-cigarette (vaping) users were five times more likely to be diagnosed with COVID-19. Moreover, people who both smoke and using vape (dual users) have a seven times higher chance of being infected with COVID-19. Dr. Debra Fine from the study also noted that not only can it increase the risk of corona virus infections, the vaping habit can also increase the potential for various other diseases.

The screenshot shows a Zoom meeting window with a PowerPoint slide titled "POSISI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN". The slide content includes:

Pernyataan di media masih didominasi K/L yang tidak setuju kenaikan cukai, kesempatan pada K/L atau individu yang belum bersuara

| Pro | Normative | No statement | Mixed | Contra |
|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| KemKes | Presiden | Wakil Presiden | Kemko Ekonomi | KemPerin |
| TNP2K | Kementan | Bappenas | Kemkeu | KemNaker |
| BPS-K | Gubernur Jatim | KemkoPMK | DPR-RI | KPPU |
| | KSP | KPPPA | BPS | Gubernur Jateng |
| | | Kemendag | Ombudsman | DPRD Jabar |
| | | | | DPRD Jateng |

Kesempatan untuk memperkuat dukungan

The screenshot shows a Zoom meeting window with a PowerPoint slide titled "Metodologi dan Definisi Operasional". The slide content includes:

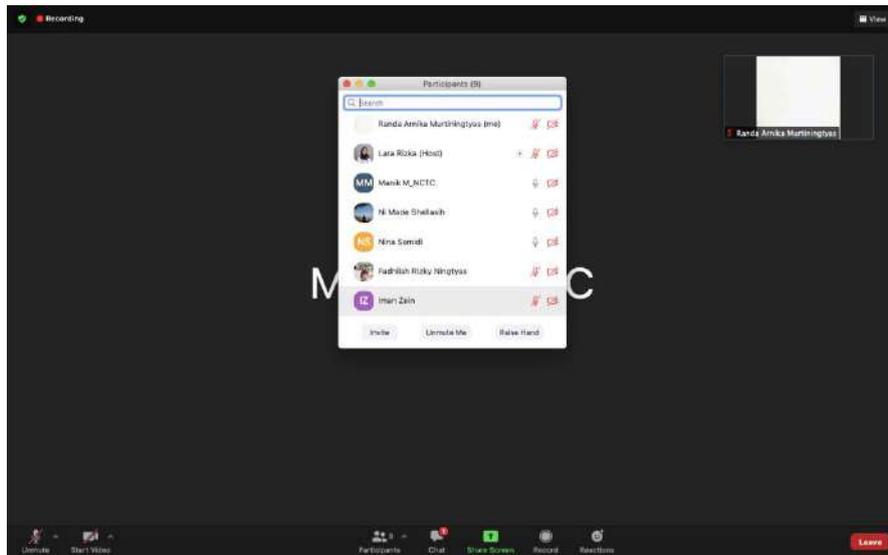
Metodologi dan Definisi Operasional

- Melihat posisi stakeholder dan institusi dalam merespon isu kenaikan tarif dan simplifikasi cukai.
- Posisi stakeholder dinilai dari statement di media online dan offline selama Januari 2015-Desember 2019.
- Hanya mencakup individu yang masih menjabat pada periode pemerintahan saat ini.

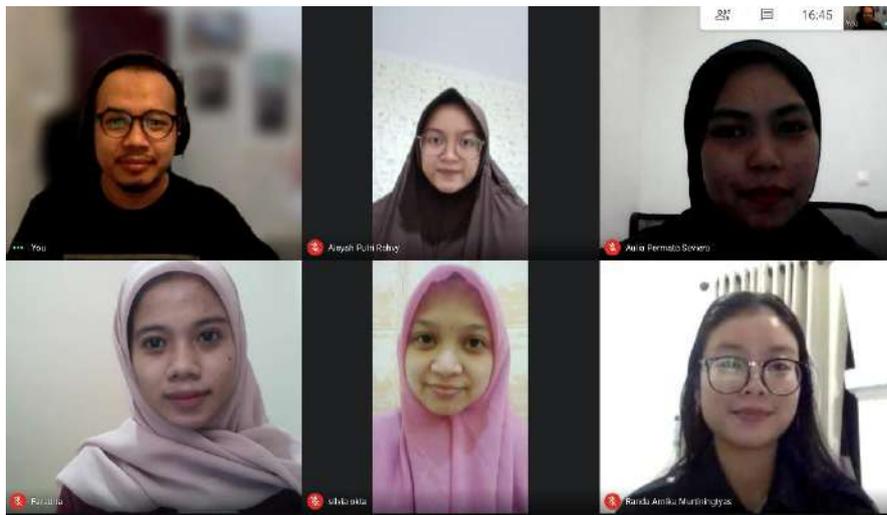
Criteria for stakeholder positions:

- Pro: Setuju pada kenaikan tarif dan/atau simplifikasi cukai
- Contra: Tidak Setuju pada kenaikan tarif dan/atau simplifikasi cukai
- Normative: Memberikan pernyataan yang bertolak belakang terhadap kenaikan tarif dan/atau simplifikasi cukai
- Mixed: Tidak memberikan pernyataan di media, tapi secara fungsi jabatan dapat mempengaruhi kebijakan cukai
- No statement: Memberikan pernyataan normatif tanpa menunjukkan sikap yang tegas

Rapat dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Tim Tobacco Control CISDI



Supervisi Magang bersama Dosen Pembimbing



Lampiran 3. Absensi Magang Individu**LEMBAR CATATAN KEGIATAN MAGANG FKM UNAIR**

NAMA : RANDA ARNIKA MURTININGTYAS

NIM : 101711133172

PRODI/INSTANSI : KESEHATAN MASYARAKAT/UNIVERSITAS AIRLANGGA

TEMPAT MAGANG : CENTER FOR INDONESIA'S STRATEGIC DEVELOPMENT

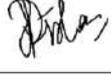
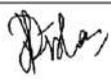
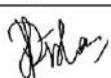
INITIATIVES (CISDI)

| MINGGU | KEGIATAN | TANDA TANGAN PEMBIMBING LAPANGAN |
|--------|--|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengenalan tempat magang dengan Tim Center Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) b. Pengenalan tim tobacco control c. Mempelajari tentang political mapping mengenai kenaikan cukai d. Pembagian tugas political mapping e. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 dengan target selesai 50% |  |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 dengan target selesai 100% b. Rapat dengan tim tobacco control untuk penyampaian progress political mapping. |  |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Bersama tim dan membahas penentuan kategori dari pernyataan yang sudah di input b. Menganalisis argumen per kategori berdasarkan inti sari pernyataan |  |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat team update membahas mengenai progress masing masing tim b. Pemberian tugas untuk political mapping bagian eksekutif c. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media khusus bagian eksekutif d. Menyusun laporan magang. |  |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | <ul style="list-style-type: none">a. Rapat dengan tim tobacco control untuk menyampaikan progress political mapping bagian eksekutifb. Rapat dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Bersama tim tobacco control CISDI menyampaikan political mapping secara keseluruhanc. Memperbaiki revisi political mappingd. Menyusun laporan magang |  |
|---|---|---|

Lampiran 4. LOGBOOK

Nama : Randa Arnika Murtiningtyas
NIM : 101711133172
Tempat Magang : Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) –
Tobacco Control
Mentor : Lara Rizka

| TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PARAF PEMBIMBING LAPANGAN |
|------------------|--|---|
| 25 Januari 2021 | - | - |
| 26 Januari 2021 | - Pengenalan tempat magang dengan Tim Center Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) - Pengenalan dengan tim Tobacco Control Unit |  |
| 27 Januari 2021 | - Pembagian tugas political mapping - Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 |  |
| 28 Januari 2021 | - Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 |  |
| 29 Januari 2021 | - Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 |  |
| LIBUR | | |
| LIBUR | | |
| 1 Februari 2021 | e. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 |  |
| 2 Februari 2021 | f. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 |  |
| 3 Februari 2021 | g. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 |  |
| 4 Februari 2021 | h. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 |  |
| 5 Februari 2021 | - Rapat dengan tim tobacco control untuk penyampaian progress political mapping. |  |
| LIBUR | | |
| LIBUR | | |
| 8 Februari 2021 | i. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 |  |
| 9 Februari 2021 | j. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media selama tahun 2020 |  |
| 10 Februari 2021 | k. Rapat Bersama tim dan membahas penentuan kategori dari pernyataan yang sudah di input |  |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 11 Februari 2021 | l. Menganalisis argumen per kategori berdasarkan inti sari pernyataan. | <i>Didas</i> |
| LIBUR | | |
| 15 Februari 2021 | m. Menganalisis argumen per kategori berdasarkan inti sari pernyataan. | <i>Didas</i> |
| 16 Februari 2021 | n. Menganalisis argumen per kategori berdasarkan inti sari pernyataan. | <i>Didas</i> |
| 17 Februari 2021 | o. Rapat team update membahas mengenai progress masing masing tim p. Pemberian tugas untuk political mapping bagian eksekutif dan legislatif | <i>Didas</i> |
| 18 Februari 2021 | q. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media khusus bagian eksekutif | <i>Didas</i> |
| 19 Februari 2021 | r. Mengimput pernyataan argumentasi untuk diskursus cukai di media khusus bagian eksekutif | <i>Didas</i> |
| LIBUR | | |
| LIBUR | | |
| 22 Februari 2021 | s. Rapat dengan tim tobacco control untuk menyampaikan progress political mapping bagian eksekutif t. Menyusun laporan magang | <i>Didas</i> |
| 23 Februari 2021 | u. Rapat dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Bersama tim tobacco control CISDI menyampaikan political mapping secara keseluruhan v. Menyusun laporan magang | <i>Didas</i> |
| 24 Februari 2021 | w. Memperbaiki revisi political mapping x. Menyusun laporan magang | <i>Didas</i> |
| 25 Februari 2021 | y. Memperbaiki revisi political mapping z. Menyusun laporan magang | <i>Didas</i> |
| 26 Februari 2021 | aa. Memperbaiki revisi political mapping bb. Menyusun laporan magang | <i>Didas</i> |
| LIBUR | | |
| LIBUR | | |

Lampiran 5. Surat Izin Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Website: <http://www.fkm.unair.ac.id> E-mail: info@fkm.unair.ac.id

Nomor : 5317/UN3.1.10/PK/2020
Hal : **Permohonan izin magang**

6 November 2020

Yth. Direktur
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
Jl. Cut Nyak Dien No. 5 RT 6/RW 2, Gondangdia Kec. Menteng
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, atas nama :

| No. | Nama Mahasiswa | NIM. | PEMINATAN | PEMBIMBING |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Aisyah Putri Rahvy | 101711133153 | Administrasi & Kebijakan Kesehatan | Ilham Aksanu Ridho, S.KM., M.Kes |
| 2. | Aulia Permata Sevieria | 101711133197 | | |
| 3. | Faradita | 101711133178 | | |
| 4. | Randa Arnika Murtiningtyas | 101711133172 | | |
| 5. | Silvia Okta Anggraini | 101711133092 | | |

Sebagai peserta magang di Instansi Saudara, mulai 18 Januari 2021

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nuzulita Anita Damayanti, drg., M.S.
NIP 196202281989112001

Tembusan :

1. Dekan FKM UNAIR;
2. Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
3. Ketua Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan, FKM UNAIR;
4. Koordinator Magang Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 6. Surat Balasan Izin Magang dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).



PUSAT INISIATIF STRATEGIS
UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA
Jl. Probolinggo No. 40-C, Menteng,
Jakarta 10350 - Indonesia
T. 62-21 3917590 ■ F. 62-21 3913471
e: sekretariat@cisdi.org ■ www.cisdi.org

No : 01/CISDI/HR/III/2021
Lampiran : -
Hal. : Surat Balasan Permohonan Izin Magang

Kepada Yth.
Dekan FKM UNAIR; dan
Mahasiswa/i Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1)

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Magang nomor 5317/UN3.1.10/PK/2020 tertanggal 6 November 2020, maka dengan ini kami, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) bersedia dan setuju untuk memberikan program magang mahasiswa/i Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Program magang akan dilaksanakan selama 4 (empat) minggu sejak tanggal 20 Januari hingga 24 Februari 2021.

Demikian surat balasan permohonan dari kami, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kejasamanya yang baik.

Dikeluarkan di : CISDI
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

Direktur Eksekutif

Gatot Suarman

Lampiran 7. Sertifikat atau Surat Keterangan Magang Kerja dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).



PUSAT INISIATIF STRATEGIS
UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA
Jl. Probolinggo No. 40-C, Menteng,
Jakarta 10350 - Indonesia
T. 62-21 3917590 • F. 62-21 3913471
e. secretariat@cisdi.org • www.cisdi.org

SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA

NOMOR : SKMK 021/CISDI/IV/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Suarman
Jabatan : Direktur Eksekutif

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : 1. Aisyah Rahvy
2. Aulia Permata Sevieria
3. Randa Arnika
4. Silvia Okta
5. Devi Ultima
6. Faradita

Asal Universitas : Universitas Airlangga

Bahwa nama yang disebutkan di atas telah menyelesaikan kegiatan magang kerja sebagai *Student Internship* di perusahaan kami selama (4 Minggu) sejak tanggal 20 Januari hingga 24 Februari 2021. Selain itu, pihak yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan baik selama kegiatan magang kerja.

Demikian surat keterangan magang kerja ini dibuat sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 April 2021
Direktur Eksekutif CISDI

Gatot Suarman

Lampiran 8. Pemberitaan Harian dari Daily Monitoring Report

| | | | |
|---|---|------|-----------------|
| Date | 1 January 2020 | Tone | POSITIVE |
| Journalist | Hendra Kusuma | | |
| Media | Detik | | |
| Spokesperson | Customs and Excise Directorate General spokesperson, Deni Surjantoro Finance Minister, Sri Mulyani Indrawati Indonesian President, Joko Widodo | | |
| <p><u>ANNOUNCEMENT FOR ACTIVE SMOKERS! TODAY, CIGARETTES PRICE INCREASES</u></p> <p>The Indonesian government officially raises the price of cigarettes which in accordance with the policy to increase the cigarettes excise (CHT) by 23% and the retail cigarettes prices (HJE) by 35%. The increase in CHT and HJE was contained in the Finance Ministerial Regulation (PMK) No. 152/2019 on the excise rates for tobacco products. It is known that the type of White Cigarettes Machine (SPM) has the highest increase in cigarettes excise rates by 29.96%. Meanwhile, the Hand-rolled Filter Kretek Cigarettes (SKTF) is rising up to 25.42%, Machine-made Kretek Cigarettes (SKM) is 23.49%, and Hand-rolled Kretek Cigarettes (SKT) is 12.84%. For HJE, the cigarette price will be around IDR 40.000 – IDR 60.000. This increase is believed to be able to reduce the cigarette sales and the number of smokers.</p> | | | |